

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hadi, Moeljo. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah*. 2001. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. 2005. Yogyakarta. Pembaharuan
- Muljono, Djoko. 2008. *Hukum Pajak: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta. Andi
- Rahayu, Siti Kurni. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. PT.RajaGrafindo. Jakarta
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta
- Rusjidi, Muhammad. 2009. *PPSP Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Edisi Kedua*. Jakarta. PT.Indeks.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi K.S. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Refika Aditama
- Surjoputro, Djoko Slamet & Widodo, Junaedi Eko. 2004. *Menuju Sistem dan Admistrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*. Jakarta: JICA dan DJP
- Zuraida, Ida. 2011. *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Jakarta. Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566)

Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.

C. Putusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa

D. Peraturan Direktorat Jendral Pajak

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

E. Jurnal

Pasaleng, Agustinus., *et al.* *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal ISSN 2303-174. 2013

F. Skripsi

Wijayanto, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan)*. Fakultas Ekonomi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran

G. Kamus

Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minnesota. West Publishing.

H. Internet

Gunadi, *Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat Dalam Perspektif Baru*, <http://www.perspektif.net/articles/view.asp?id=431>, diakses 28 Februari 2016 pukul 10.20 WIB